PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AGUSTINUS BUDI HARTONO**
2. Jabatan : **DIREKTUR**
3. NHK : **205249**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — **Rp. 2.820.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/110 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.020.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 153 m2/38 m2 di KAB / KOTA KOTA BOGOR , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
3. Tanah Seluas 5.119 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
4. Tanah Seluas 60 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 50 m2/27 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — **Rp. 542.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 305.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
3. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 223.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA — **Rp. 343.000.000**

D. SURAT BERHARGA — **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS — **Rp. 472.321.665**

F. HARTA LAINNYA — **Rp. ----**

Sub Total	**Rp.**	**4.177.321.665**
III. HUTANG	**Rp.**	**571.544.704**
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	**Rp.**	**3.605.776.961**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.